

Studi Lanjut

ANALISIS BUDAYA

ARIEL HERYANTO

Profesor Emeritus dari Profesor Emeritus dari Universitas Monash di Melbourne, Australia



Untuk memperkuat pendidikan tinggi, dana abadi telah disediakan negara. Tujuan itu bisa dicapai dengan berbagai cara. Wajah publik paling tenar dari dana abadi itu berwujud beasiswa studi lanjut pascasarjana lewat Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP. Ribuan sarjana RI setiap tahun dibiayai LPDP untuk studi lanjut bergelar magister atau doktor di Amerika, Eropa, Asia, dan Australia.

Yang jelas diuntungkan program LPDP adalah prospek karier individu penerima beasiswa dan universitas asing yang menerima biaya pendidikan mereka. Ketimbang mengobrol

(Bersambung ke hlm 15 kol 5-7)

Studi Lanjut

(Sambungan dari halaman 1)

belanja besar untuk memproduksi sebanyak-banyaknya lulusan pascasarjana luar negeri, sebaiknya Indonesia mulai memprioritaskan perbaikan ekosistem pendidikan tinggi dalam negeri sendiri. Program studi lanjut ke luar negeri tetap perlu, tetapi lebih selektif dan terarah sebagai pelengkap strategi makro pemberdayaan sistem pendidikan tinggi di dalam negeri sendiri.

LPDP menanggung beban lebih berat dari sekadar memperkuat kampus dalam negeri. Ia diharapkan "mendorong inovasi demi terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan". Apakah ambisi itu tidak berlebihan? Bagaimana kesuksesan program seambisus itu bisa diukur?

Jika seleksi beasiswa LPDP sudah bagus, penerima beasiswa menyelesaikan studi, langsung pulang dengan gelar mentereng lalu bekerja di Tanah Air, apakah itu artinya sukses? Mungkin bisa dibilang sukses di atas kertas. Namun, semua itu tidak berarti tercapai tujuan utama yang ambisius seperti terkutip tadi. Belum jelas apakah Indonesia sudah atau hampir sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. Kalaupun jawabannya ya, masih layak dikaji apakah hal itu disebabkan oleh pengabdian lulusan LPDP menjadi faktor pendukungnya?

Sejumlah asumsi dan strategi di balik program LPDP layak dikaji ulang. Terkesan ada asumsi atau harapan berlebihan atas jasa pendidikan pascasarjana bagi hal-hal di luar bidang ilmu dan pendidikan. Seakan-akan diasumsikan dengan semakin banyak lulusan magister dan doktor, akan semakin cerah masa depan bangsa ini. Sejauh mana asumsi itu didukung fakta?

Di banyak negara yang kini lazim dipandang berjaya dan sejahtera, mayoritas elitnya tidak bergelar pascasarjana. Tidak di kabinet negara. Tidak juga di birokrasi pemerintahan atau industri mereka. Ada yang bergelar magister atau doktor, tapi mereka itu se-

gelintir perkecualian. Di kalangan mereka sendiri tidak ada anggapan gelar itu relevan bagi kerja mereka.

Seperti di banyak negeri lain, jumlah warga RI yang bergelar pascasarjana sangat kecil. Bedanya, di negeri ini gairah memuliakan gelar akademik itu luar biasa besarnya. Yang bergelar pascasarjana dianggap warga istimewa. Ada pejabat negara diolok-olok hanya karena tak punya gelar akademik mentereng. Ada yang bergelar akademik, tapi gelar mereka diragukan. Tidak sedikit politikus berlomba mencari gelar pascasarjana, tanpa niat beralih profesi sebagai akademikus.

Gejala semacam itu sulit dijumpai di banyak negeri tempat para penerima beasiswa LPDP berstudi lanjut. Australia menjadi salah satu tujuan paling favorit kelompok terpelajar Indonesia untuk studi pascasarjana, dengan atau tanpa beasiswa LPDP. Program studi pascasarjana di negeri itu sangat mahal dan menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar negara. Di sejumlah universitas elite mereka, jumlah mahasiswa asing yang menempuh studi doktoral sama atau melebihi mahasiswa lokal.

Sulit dicerna nalar, mengapa orang Indonesia diasumsikan akan lebih siap atau hebat membangun negerinya jika sudah lulus pendidikan pascasarjana di Amerika, Eropa, dan Australia. Pendidikan di luar negeri tidak didesain untuk menyiapkan lulusan yang lebih hebat mengabdikan dalam bentuk praktik kerja di Indonesia atau di satu negeri lain secara khusus.

Alumni LPDP diwajibkan "setia, taat, dan mengakui Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintah". Ini bukannya salah. Namun, kurikulum pendidikan di mancanegara disusun oleh mereka yang mungkin pernah mendengar nama Bali, tapi tidak tahu Bali itu bagian dari RI. Apalagi paham Pancasila, UUD 1945, atau NKRI. Kemungkinan sebagian besar dosen mereka tidak pernah menginjakkan kaki di bumi RI dan tidak pernah berminat. Jangankan memahami seluk-beluk masalah kebu-

tuhan dan tantangan di Tanah Air.

Pendidikan tidak hanya terjadi di universitas. Pendidikan universitas tidak untuk menyelesaikan semua masalah. Pendidikan bergelar doktor berpotensi memberikan sumbangan besar bagi kehidupan manusia sedunia. Namun, sumbangan itu tidak selalu tampak dalam jangka dekat. Tidak selalu merata dalam semua bidang kehidupan. Di banyak negara liberal, mendalami ilmu demi kemajuan ilmu itu sendiri merupakan tradisi panjang. Tradisi itu asing dalam konteks Indonesia.

Di Indonesia, sejak masa kolonial, pendidikan berkilat pada ilmu terapan. Lulusannya diharapkan mengabdikan sesegera mungkin dan sepenuhnya pada program pemerintah. Di sejumlah negeri liberal, semakin tinggi tingkat pendidikan atau penelitian mereka, semakin teoretis dan global atau universal kibat dan wawasannya. Di sana ada sistem pendidikan lain, lebih murah dan pendek waktunya, yang melatih tenaga terampil untuk melayani kebutuhan masyarakat dengan kerja praktis.

Untuk memperkuat pendidikan tinggi di Tanah Air, dibutuhkan kebijakan berawasan lebih luas dari sekadar menambah lulusan dari mancanegara. Kesejahteraan tenaga kerja kampus layak ditingkatkan. Bukan hanya secara materi dan keuangan, melainkan juga rasa aman dan nyaman. Ini menyangkut batasan beban kerja, perlindungan status kerja, promosi, cuti, dan kemerdekaan berpikir-berdiskusi-meneliti dan memublikasikan hasil penelitian.

Jika memungkinkan, tenaga akademik dari universitas-universitas unggulan di dunia layak direkrut dengan kondisi kerja dan imbalan bertaraf global. Sebagian dana untuk beasiswa pascasarjana LPDP bisa dialihkan untuk rekrutmen itu. Andaikan setiap rekrutan bisa melatih beberapa puluh sarjana pascasarjana di Tanah Air berstandar global, investasi itu bernilai strategis sangat tinggi berjangka panjang.